

National Leadership Regeneration by Political Parties: Political Recruitment and Cadre Development

Regenerasi Kepemimpinan Nasional Oleh Partai Politik: Rekrutmen Politik Dan Kaderisasi

Didi Hendrawan^{1*}, Tito Handoko²

^{1,2} Universitas Riau, Indonesia

*Correspondence Author: didihendrawan.sip15@gmail.com

Abstract

The renewal of national leadership is an essential prerequisite for the realization of a high-quality democracy. In this context, political parties play a strategic role in conducting political recruitment and cadre development to produce leaders who are competent, possess integrity, and are oriented toward the public interest. The success of these two functions is a key factor in improving the quality of national leadership and strengthening democracy. However, in practice, the implementation of political recruitment and cadre development in Indonesia still faces various structural challenges that hinder the leadership renewal process from reaching its full potential. This study aims to analyze the dynamics of political recruitment and cadre development within political parties in support of national leadership renewal. The study employs a qualitative method using a literature review approach (library research) through the analysis of various laws and regulations, academic books, journal articles, and relevant documents. The findings reveal a significant gap between the ideal concept and the actual implementation of political recruitment and cadre development in Indonesia. Political recruitment remains dominated by pragmatic, elitist, and electability-oriented approaches, giving rise to the phenomenon of popularity-based recruitment, which prioritizes popularity over competence, integrity, and political track record. On the other hand, the cadre development system has not been consistently implemented due to the dominance of party oligarchies, high political costs, weak internal democracy, and the suboptimal application of meritocratic principles. These conditions result in low-quality national leadership succession and have the potential to hinder democratic consolidation and the institutionalization of political parties.

Keywords: Cadre Development, Meritocracy, National Leadership Regeneration, Political Parties, Political Recruitment.

Abstrak

Regenerasi kepemimpinan nasional merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, partai politik berperan strategis dalam melaksanakan rekrutmen politik dan kaderisasi untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Keberhasilan kedua fungsi tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dan memperkuat demokrasi. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan rekrutmen politik dan kaderisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang berdampak pada belum optimalnya proses regenerasi kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika rekrutmen politik dan kaderisasi partai politik dalam mendukung regenerasi kepemimpinan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen yang relevan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara konsep ideal dan implementasi rekrutmen politik serta kaderisasi di Indonesia. Rekrutmen politik masih didominasi oleh pendekatan pragmatis, elitis, dan berorientasi pada elektabilitas sehingga memunculkan fenomena *popularity-based recruitment* yang lebih mengutamakan popularitas dibandingkan dengan kompetensi, integritas, dan rekam jejak politik. Di sisi lain, sistem kaderisasi belum berjalan secara konsisten akibat dominasi oligarki partai, tingginya biaya politik, lemahnya demokrasi internal, serta belum optimalnya penerapan prinsip meritokrasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kualitas regenerasi kepemimpinan nasional dan berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi serta pelemagaan partai politik.

Kata Kunci: Kaderisasi, Meritokrasi, Partai Politik, Regenerasi Kepemimpinan, Rekrutmen Politik.

1. Introduction

Regenerasi kepemimpinan nasional merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi modern sekaligus menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Keberlangsungan sistem demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum secara berkala sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang konstitusional, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan institusi politik dalam menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, legitimasi politik, kompetensi manajerial, serta komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan Masyarakat (Yandra, 2020). Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur elektoral yang berjalan secara rutin, melainkan juga dari sejauh mana proses regenerasi kepemimpinan mampu menghadirkan pemimpin yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang.

Dalam perspektif kelembagaan politik, regenerasi kepemimpinan menjadi mekanisme strategis untuk menjamin kesinambungan pemerintahan, memperkuat stabilitas politik, serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan negara. Huntington (1968) menjelaskan bahwa stabilitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat institusionalisasi organisasi politik, khususnya kemampuannya dalam melaksanakan regenerasi kepemimpinan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat institusionalisasi suatu organisasi politik, semakin besar pula kemampuannya dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan tanpa menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan. Sebaliknya, lemahnya proses regenerasi akan menyebabkan terjadinya stagnasi elite, terbatasnya sirkulasi kepemimpinan, rendahnya inovasi kebijakan publik, meningkatnya personalisasi kekuasaan, serta

menurunnya kepercayaan rakyat terhadap institusi politik dan proses demokrasi itu sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan kualitas representasi politik serta menghambat konsolidasi demokrasi yang telah dibangun melalui reformasi politik di Indonesia.

Sistem demokrasi Indonesia, partai politik merupakan institusi yang memiliki kedudukan strategis sekaligus kewenangan konstitusional dalam proses regenerasi kepemimpinan nasional. Konstitusi memberikan legitimasi kepada partai politik sebagai satu-satunya saluran utama untuk mengusulkan calon-calon pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis di tingkat nasional maupun daerah. Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa partai politik memiliki posisi yang sangat menentukan dalam proses seleksi dan distribusi kepemimpinan politik di Indonesia.

Peran strategis tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memberikan mandat kepada partai politik untuk melaksanakan berbagai fungsi penting, antara lain pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, rekrutmen politik, kaderisasi, serta pengembangan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral untuk memenangkan kontestasi politik, tetapi juga sebagai institusi demokrasi yang bertanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia politik yang berkua

litas melalui sistem rekrutmen dan kaderisasi yang profesional, transparan, demokratis, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan nasional pada hakikatnya merupakan refleksi dari kualitas kelembagaan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Secara teoritis, rekrutmen politik merupakan proses seleksi individu untuk menduduki jabatan politik melalui mekanisme yang dirancang oleh organisasi politik guna memperoleh calon pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, legitimasi, dan kapasitas kepemimpinan yang memadai (Norris, 1997). Rekrutmen politik bukan sekadar proses administratif untuk menentukan kandidat dalam pemilihan umum, tetapi merupakan instrumen strategis dalam membangun representasi politik yang berkualitas. Melalui mekanisme rekrutmen yang demokratis, partai politik diharapkan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kader untuk berkompetisi berdasarkan prestasi, pengalaman, kapasitas, dan rekam jejak, sehingga prinsip meritokrasi dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan politik.

Di sisi lain, kaderisasi merupakan proses pendidikan politik yang dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk membentuk kader yang memiliki pemahaman ideologis, kapasitas kepemimpinan, kemampuan teknokratis, integritas moral, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik (Haris et al., 2016). Kaderisasi menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan organisasi politik karena melalui proses tersebut partai politik mempersiapkan calon-calon pemimpin yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. Proses kaderisasi yang efektif tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter kepemimpinan, etika politik, kemampuan komunikasi publik, serta kapasitas dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik.

Rekrutmen politik dan kaderisasi pada hakikatnya merupakan dua proses yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun regenerasi kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik berfungsi sebagai pintu masuk bagi individu untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan politik, sedangkan kaderisasi menjadi mekanisme pembentukan kualitas individu yang akan direkrut. Ketidadaan salah satu dari kedua proses tersebut akan berdampak langsung terhadap kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Rekrutmen yang tidak didukung oleh kaderisasi yang kuat berpotensi melahirkan pemimpin yang instan, pragmatis, dan minim pengalaman organisasi. Sebaliknya, kaderisasi yang berjalan baik tetapi tidak diikuti sistem rekrutmen yang terbuka dan berbasis merit hanya akan menghasilkan kader-kader potensial yang sulit memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik.

Idealnya, proses rekrutmen politik dan kaderisasi dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi internal, serta kesetaraan kesempatan bagi seluruh kader. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa individu yang memperoleh kesempatan menduduki jabatan publik merupakan mereka yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik politik di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang menyebabkan fungsi ideal partai politik belum sepenuhnya terlaksana. Proses seleksi calon pemimpin masih didominasi oleh pertimbangan elektabilitas, popularitas, kedekatan dengan elite partai, hubungan kekerabatan, serta kemampuan finansial dibandingkan kompetensi, pengalaman organisasi, maupun rekam jejak kepemimpinan (Koho, 2021;

Erlina, 2023). Fenomena tersebut melahirkan pola popularity-based recruitment, yaitu mekanisme rekrutmen yang lebih mengutamakan tingkat popularitas kandidat dibandingkan kualitas kepemimpinan yang dimiliki.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan menguatnya praktik oligarki dalam tubuh partai politik. Michels (1911), melalui teori Iron Law of Oligarchy, menjelaskan bahwa setiap organisasi politik cenderung mengalami konsentrasi kekuasaan pada sekelompok kecil elite yang mengendalikan arah organisasi serta proses pengambilan keputusan. Dalam konteks partai politik Indonesia, fenomena tersebut terlihat dari dominasi elite dalam menentukan calon kepala daerah, calon anggota legislatif, hingga calon presiden tanpa mekanisme kompetisi internal yang sepenuhnya terbuka. Akibatnya, kesempatan kader untuk berkembang sering kali lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elite dibandingkan prestasi dan kompetensi yang dimiliki. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat sirkulasi elite secara sehat, tetapi juga memperlemah demokrasi internal partai serta mengurangi peluang munculnya pemimpin-pemimpin baru yang inovatif dan berintegritas.

Selain persoalan oligarki, tingginya biaya politik turut memperburuk kualitas rekrutmen politik di Indonesia. Kompetisi elektoral yang semakin mahal mendorong partai politik untuk lebih mengutamakan kandidat yang memiliki sumber daya ekonomi dibandingkan kader yang telah melalui proses kaderisasi secara panjang. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa selama Pemilu Tahun 2024 terdapat 90 temuan dan 144 laporan dugaan politik uang yang diproses oleh lembaga pengawas pemilu. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi salah satu persoalan serius dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil survei Indikator Politik Indonesia pasca

Pemilu 2024 yang menunjukkan bahwa sekitar 35% responden mengaku menentukan pilihan karena faktor uang, meningkat dibandingkan Pemilu Tahun 2019 yang berada pada angka 28%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku memilih masyarakat. Dalam situasi demikian, partai politik cenderung lebih mempertimbangkan kekuatan finansial dan elektabilitas kandidat dibandingkan kualitas kaderisasi yang telah dijalani. Akibatnya, prinsip meritokrasi dalam proses rekrutmen politik menjadi semakin sulit diwujudkan, sementara kader-kader potensial yang memiliki kompetensi justru menghadapi hambatan untuk memperoleh kesempatan berkompetisi secara adil.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji rekrutmen politik, kaderisasi, maupun oligarki partai politik sebagai tema yang berdiri sendiri. Penelitian Koho (2021) lebih menitikberatkan pada pengaruh oligarki terhadap demokrasi internal partai. Erlina (2023) mengkaji kelemahan sistem kaderisasi partai politik di Indonesia, sedangkan Nugroho dan Hosnah (2024) menyoroti keterkaitan dominasi elite partai dengan potensi korupsi politik. Sementara itu, Yusuf et al. (2024) memfokuskan pembahasannya pada praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami berbagai persoalan kepartaian di Indonesia, kajian-kajian tersebut masih bersifat parsial karena menempatkan rekrutmen politik, kaderisasi, oligarki, politik uang, dan kualitas kepemimpinan sebagai variabel yang dianalisis secara terpisah. Akibatnya, belum tersedia suatu kerangka analisis yang mampu menjelaskan keterhubungan antarvariabel tersebut secara menyeluruh dalam konteks regenerasi kepemimpinan nasional.

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan

rekrutmen politik dan kaderisasi sebagai satu kesatuan mekanisme regenerasi kepemimpinan nasional dalam perspektif kelembagaan partai politik. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berorientasi pada evaluasi demokrasi internal partai, perilaku elite politik, fenomena oligarki, maupun dinamika pemilu, tanpa menjelaskan bagaimana kualitas sistem rekrutmen politik dan kaderisasi secara simultan dipengaruhi oleh oligarki partai, tingginya biaya politik, politik uang, dan lemahnya demokrasi internal, serta bagaimana interaksi seluruh faktor tersebut menentukan kualitas regenerasi kepemimpinan nasional. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan konseptual (*conceptual gap*) sekaligus kekosongan analitis (*analytical gap*) mengenai model regenerasi kepemimpinan yang mampu menjelaskan hubungan kausal antarvariabel tersebut secara komprehensif.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang memposisikan rekrutmen politik dan kaderisasi sebagai dua pilar utama regenerasi kepemimpinan nasional dalam satu model konseptual yang saling terintegrasi. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan masing-masing fungsi partai politik, tetapi juga menganalisis bagaimana praktik oligarki, tingginya biaya politik, politik uang, lemahnya demokrasi internal, dan belum optimalnya penerapan meritokrasi secara simultan memengaruhi efektivitas rekrutmen politik dan kaderisasi dalam menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji variabel-variabel tersebut secara terpisah. Kerangka analisis yang dibangun diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian kelembagaan partai politik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan sistem meritokrasi, reformasi demokrasi internal partai, serta

peningkatan kualitas regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme regenerasi kepemimpinan nasional melalui sistem rekrutmen politik dan kaderisasi partai politik, mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat penerapan prinsip meritokrasi dalam proses regenerasi kepemimpinan, serta merumuskan penguatan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang lebih transparan, demokratis, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam membangun kepemimpinan nasional yang berkualitas, berintegritas, adaptif, serta mampu memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

2. Theoretical Perspective

1. Rekrutmen Politik dan Kaderisasi

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi fundamental partai politik dalam sistem demokrasi karena menjadi mekanisme utama untuk menyeleksi, mempersiapkan, dan menempatkan individu pada berbagai jabatan politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam negara demokrasi, kualitas kepemimpinan nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas proses rekrutmen yang diterapkan oleh partai politik. Rekrutmen politik tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif dalam menentukan calon pejabat publik, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa individu yang memperoleh mandat politik memiliki kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sistem rekrutmen yang baik menjadi salah satu indikator tingkat pelebagaan (*institutionalization*) partai politik sekaligus mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara.

Menurut Haris (2014), rekrutmen politik merupakan proses institusional yang dilakukan oleh partai politik untuk menjaring, menyel

eksi, menetapkan, serta mempersiapkan individu yang akan mengisi jabatan politik melalui mekanisme organisasi yang telah ditetapkan. Dalam perspektif kelembagaan, proses tersebut tidak hanya bertujuan memperoleh kandidat yang memiliki peluang elektoral tinggi, tetapi juga memastikan bahwa setiap calon telah memenuhi standar kompetensi, integritas, pengalaman organisasi, dan kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, rekrutmen politik yang demokratis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetisi yang terbuka, kesetaraan kesempatan, serta berorientasi pada meritokrasi sehingga setiap kader memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan prestasinya (Haris, 2014).

Dalam literatur politik komparatif, Norris (1997) menjelaskan bahwa rekrutmen politik merupakan proses multidimensional yang dipengaruhi oleh karakteristik sistem politik, sistem kepartaian, budaya organisasi, serta aturan internal partai. Dengan demikian, kualitas rekrutmen politik tidak hanya ditentukan oleh ketentuan formal yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik politik yang berkembang dalam organisasi. Semakin terbuka mekanisme seleksi yang diterapkan, semakin besar peluang munculnya kompetisi yang sehat antarkader dan semakin tinggi pula kemungkinan partai menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Namun demikian, praktik rekrutmen politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Ambardi (2009) menjelaskan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia masih mengembangkan pola rekrutmen yang bersifat tersentralisasi pada elite inti partai. Kondisi tersebut menyebabkan proses seleksi calon pemimpin sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan elite dibandingkan mekanisme kompetisi yang

terbuka. Akibatnya, proses rekrutmen tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi dan prestasi kader, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik, elektabilitas, kekuatan finansial, serta konfigurasi koalisi yang berkembang menjelang pemilihan umum.

Fenomena tersebut semakin terlihat dalam dinamika politik elektoral kontemporer di Indonesia. Muhtadi (2019) menjelaskan bahwa dalam berbagai kontestasi politik, terutama pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, tingkat popularitas dan figuritas kandidat sering kali menjadi pertimbangan utama partai politik dalam menentukan calon yang akan diusung. Kandidat yang memiliki tingkat pengenalan publik yang tinggi cenderung memperoleh peluang lebih besar dibandingkan kader yang telah lama mengikuti proses kaderisasi, meskipun memiliki pengalaman organisasi dan kompetensi yang lebih baik. Kondisi tersebut melahirkan fenomena popularity-based recruitment, yaitu mekanisme rekrutmen yang lebih menekankan aspek elektabilitas dibandingkan kualitas kaderisasi. Meskipun demikian, kecenderungan tersebut tidak berlaku secara seragam pada seluruh partai politik karena dipengaruhi oleh tingkat pelemagaan partai, karakteristik organisasi, ideologi partai, serta dinamika kompetisi politik pada setiap daerah.

Selain rekrutmen politik, kaderisasi merupakan fungsi strategis yang menentukan keberlangsungan organisasi partai politik sekaligus menjadi fondasi utama dalam membangun regenerasi kepemimpinan nasional. Kaderisasi merupakan proses pendidikan politik yang dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan untuk membentuk kader yang memiliki loyalitas organisasi, pemahaman ideologis, kemampuan teknokratis, integritas moral, serta kapasitas kepemimpinan (Haris et al., 2016). Melalui proses kaderisasi, partai politik tidak hanya mentransformasikan nilai-nilai ideologi organisasi kepada kader, tetapi juga mengembangkan kemampuan analitis,

komunikasi politik, kepemimpinan, penyusunan kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

Kaderisasi yang efektif tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi partai dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi politik jangka panjang dalam mempersiapkan calon pemimpin nasional. Harahap (2017) menjelaskan bahwa kualitas sistem kaderisasi memiliki hubungan yang erat dengan kualitas regenerasi elite politik. Partai politik yang memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur cenderung mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki pengalaman organisasi, integritas, serta kemampuan kepemimpinan yang lebih baik dibandingkan partai yang mengandalkan figur eksternal atau tokoh populer. Sebaliknya, lemahnya sistem kaderisasi akan meningkatkan ketergantungan partai terhadap kandidat instan yang belum memiliki pengalaman politik maupun komitmen ideologis yang memadai.

Pada dasarnya, rekrutmen politik dan kaderisasi bukanlah dua proses yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan mekanisme yang saling melengkapi dalam membangun regenerasi kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjadi tahap awal untuk mengidentifikasi dan menjaring individu yang memiliki potensi kepemimpinan, kapasitas intelektual, serta minat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Setelah melalui proses seleksi awal, individu tersebut kemudian mengikuti tahapan kaderisasi yang bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, serta menanamkan nilai-nilai ideologi partai. Dengan demikian, kaderisasi berfungsi sebagai proses transformasi individu menjadi kader politik yang siap mengemban tanggung jawab organisasi maupun jabatan publik.

Selanjutnya, hasil dari proses kaderisasi menjadi dasar utama dalam menentukan keberhasilan regenerasi kepemimpinan di dalam partai politik. Regenerasi kepemimpinan

merupakan proses pergantian pemimpin secara terencana yang memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik untuk menduduki posisi strategis berdasarkan kompetensi, prestasi, pengalaman, dan integritas yang dimiliki. Regenerasi yang berjalan secara sistematis akan menciptakan kesinambungan organisasi, memperkuat demokrasi internal partai, serta menghasilkan sirkulasi elite politik yang sehat. Sebaliknya, regenerasi yang tidak didukung oleh sistem rekrutmen dan kaderisasi yang baik akan melahirkan kepemimpinan yang pragmatis, personalistik, dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek.

Oleh karena itu, efektivitas sistem rekrutmen politik dan kaderisasi menjadi faktor penentu kualitas regenerasi kepemimpinan nasional. Semakin baik mekanisme rekrutmen dalam menjaring calon kader yang berkualitas dan semakin optimal proses kaderisasi dalam membentuk kompetensi serta integritas kader, maka semakin besar peluang partai politik menghasilkan pemimpin yang profesional, demokratis, dan memiliki legitimasi publik yang kuat. Sebaliknya, ketika proses rekrutmen lebih mengutamakan popularitas, kekuatan finansial, maupun kedekatan dengan elite partai tanpa didukung kaderisasi yang memadai, maka regenerasi kepemimpinan cenderung menghasilkan pemimpin yang bersifat pragmatis, elitis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, rekrutmen politik dan kaderisasi merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun sistem regenerasi kepemimpinan nasional yang demokratis, meritokratis, dan berkelanjutan.

2. Teori Sirkulasi Elite Vilfredo Pareto

Teori Sirkulasi Elite (*Circulation of Elite*) yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto merupakan salah satu teori klasik dalam kajian sosiologi politik yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat pada dasarnya selalu terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok elite dan kelompok non-elite

(Pareto, 1935). Kelompok elite merupakan individu atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan, sumber daya, pengaruh, dan kekuasaan sehingga mampu menduduki posisi strategis dalam sistem politik maupun pemerintahan. Sebaliknya, kelompok non-elite merupakan mayoritas masyarakat yang tidak memiliki akses langsung terhadap proses pengambilan keputusan politik. Menurut Pareto, keberlangsungan suatu sistem politik sangat dipengaruhi oleh kemampuan melakukan pergantian elite secara periodik melalui proses sirkulasi yang terbuka, sehingga terjadi pembaruan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

Pareto berpendapat bahwa elite bukanlah kelompok yang bersifat permanen. Seiring berjalannya waktu, elite lama akan mengalami penurunan kapasitas, kehilangan legitimasi, atau tidak lagi mampu menjawab tuntutan perubahan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, elite baru yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan sumber daya akan menggantikan posisi elite lama melalui proses sirkulasi elite. Oleh karena itu, sirkulasi elite menjadi mekanisme alamiah yang memungkinkan terjadinya pembaruan kepemimpinan, distribusi kekuasaan, serta adaptasi sistem politik terhadap perubahan sosial. Sebaliknya, apabila proses sirkulasi elite mengalami hambatan akibat dominasi kelompok tertentu, maka sistem politik akan mengalami stagnasi, meningkatnya konflik politik, menurunnya legitimasi pemerintahan, bahkan berpotensi menimbulkan krisis politik.

Dalam konteks sistem kepartaian Indonesia, teori Pareto menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana proses regenerasi kepemimpinan nasional berlangsung melalui mekanisme rekrutmen politik dan kaderisasi partai politik. Idealnya, partai politik menjadi sarana utama bagi munculnya elite-elite baru yang berasal dari proses kaderisasi yang sistematis dan berbasis meritokrasi. Namun, dalam praktiknya, proses regenerasi

kepemimpinan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan sirkulasi elite yang terbuka. Ambardi (2009) menjelaskan bahwa sistem kepartaian Indonesia menunjukkan kecenderungan menuju kartelisasi partai (*party cartelization*), yaitu kondisi ketika elite partai lebih memilih bekerja sama dalam mempertahankan akses terhadap kekuasaan dibandingkan menciptakan kompetisi politik yang sehat. Situasi tersebut menyebabkan proses pergantian kepemimpinan lebih banyak terjadi di antara kelompok elite yang sama dibandingkan membuka ruang bagi kader-kader baru yang memiliki kapasitas dan kompetensi.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa regenerasi kepemimpinan nasional dalam beberapa kondisi lebih menyerupai reproduksi elite daripada sirkulasi elite sebagaimana dijelaskan Pareto. Pergantian jabatan politik sering kali hanya melibatkan individu-individu yang berasal dari lingkaran kekuasaan yang sama, memiliki hubungan kekerabatan politik, atau memperoleh dukungan dari elite partai tertentu. Akibatnya, kesempatan bagi kader muda maupun individu yang memiliki kapasitas kepemimpinan tetapi tidak memiliki akses terhadap jaringan elite menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat oligarki partai serta menghambat pembaruan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Winters (2011) yang menjelaskan bahwa dalam demokrasi yang bercorak oligarkis, pergantian elite sering kali bersifat intra elite circulation, yaitu perputaran kekuasaan yang hanya terjadi di antara kelompok elite yang telah memiliki sumber daya ekonomi, politik, dan organisasi. Dalam kondisi demikian, proses demokrasi secara prosedural memang tetap berlangsung melalui pemilihan umum, tetapi substansi pergantian kepemimpinan tidak sepenuhnya mencerminkan terbukanya kesempatan politik bagi seluruh warga negara berdasarkan prinsip meritokrasi. Akibatnya,

mobilitas politik menjadi terbatas dan regenerasi kepemimpinan nasional kehilangan fungsi transformasinya sebagai mekanisme pembaruan elite.

Dengan demikian, Teori Sirkulasi Elite Vilfredo Pareto memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis kualitas regenerasi kepemimpinan nasional melalui mekanisme rekrutmen politik dan kaderisasi partai politik. Teori ini memungkinkan analisis mengenai apakah pergantian kepemimpinan nasional benar benar mencerminkan proses sirkulasi elite yang demokratis, terbuka, dan berbasis merit, atau justru hanya merupakan reproduksi kekuasaan di dalam lingkaran elite politik yang sama. Oleh karena itu, teori Pareto menjadi kerangka analitis yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara rekrutmen politik, kaderisasi, demokrasi internal partai, serta kualitas regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia.

3. Method

Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual mengenai regenerasi kepemimpinan nasional melalui mekanisme rekrutmen politik dan kaderisasi partai politik, sehingga memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Menurut Zed (2014), studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui proses pengumpulan, identifikasi, penelaahan, serta analisis secara sistematis terhadap berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga negara, serta berbagai referensi akademik lain yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Melalui metode ini, peneliti berupaya membangun pemahaman yang komprehensif

mengenai fenomena yang dikaji dengan memadukan berbagai perspektif teoritis dan temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan mendeskripsikan, memahami, serta menginterpretasikan berbagai konsep, teori, dan dinamika yang berkaitan dengan rekrutmen politik, kaderisasi, serta regenerasi kepemimpinan nasional secara mendalam. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara holistik melalui interpretasi terhadap berbagai data yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang berkembang dalam literatur dengan realitas praktik rekrutmen politik dan kaderisasi partai politik di Indonesia sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kualitas regenerasi kepemimpinan nasional.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu melalui tahapan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membandingkan, menginterpretasikan, serta mengkritisi berbagai sumber pustaka yang telah dikumpulkan. Setiap literatur dianalisis secara sistematis untuk menemukan persamaan, perbedaan, kecenderungan, serta hubungan antargagasan yang berkembang dalam berbagai penelitian sebelumnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis guna membangun argumentasi ilmiah yang mampu menjelaskan keterkaitan antara sistem rekrutmen politik, kaderisasi partai, demokrasi internal, meritokrasi, oligarki politik, serta proses regenerasi kepemimpinan nasional. Proses sintesis ini tidak hanya bertujuan merangkum berbagai pendapat para ahli, tetapi juga menghasilkan pemahaman

konseptual yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang memiliki kredibilitas, validitas, dan relevansi terhadap tema penelitian (Sugiyono, 2019). Sumber data meliputi buku ilmiah yang membahas teori kepartaian, rekrutmen politik, kaderisasi, demokrasi, dan sirkulasi elite; artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional; peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; serta dokumen resmi dari lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga survei yang relevan. Seluruh sumber pustaka dipilih berdasarkan tingkat relevansi dengan fokus penelitian, otoritas penulis atau lembaga penerbit, kebaruan informasi, serta kontribusinya dalam menjelaskan fenomena regenerasi kepemimpinan nasional melalui rekrutmen politik dan kaderisasi.

Untuk menjamin validitas analisis, penelitian ini menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan rekrutmen politik, kaderisasi, oligarki partai, demokrasi internal, meritokrasi, serta regenerasi kepemimpinan nasional. Tema-tema tersebut kemudian dibandingkan dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, seperti teori rekrutmen politik, teori kaderisasi, serta Teori Sirkulasi Elite Vilfredo Pareto. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola konseptual, hubungan antarvariabel, serta kesenjangan (*research gap*) yang masih terdapat dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat dirumuskan sintesis ilmiah yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, penggunaan metode library research melalui pendekatan kualitatif deskriptif analitis memberikan landasan metodologis yang kuat untuk menjelaskan secara mendalam dinamika regenerasi kepemimpinan nasional oleh partai politik melalui mekanisme rekrutmen politik dan kaderisasi. Metode ini tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai konsep dan praktik yang berkembang dalam sistem kepartaian Indonesia, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap berbagai persoalan yang memengaruhi efektivitas rekrutmen politik dan kaderisasi, sekaligus menghasilkan sintesis konseptual yang dapat memperkaya pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai penguatan sistem meritokrasi, demokrasi internal partai, dan pembangunan kepemimpinan nasional yang berkualitas.

4. Result and Discussion

1. Pola Rekrutmen Politik Partai Politik di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik partai politik di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam hal konsistensi antara norma kelembagaan dan praktik empiris di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik memiliki fungsi strategis dalam melakukan pendidikan politik, kaderisasi, serta rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah. Dalam kerangka ini, partai politik seharusnya menjadi institusi utama dalam mencetak pemimpin melalui mekanisme yang terstruktur, sistematis, dan berbasis meritokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, rekrutmen politik di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Proses seleksi kandidat lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan elektoral jangka pendek dibandingkan dengan kualitas dan kapasitas kader. Hal ini menunjukkan adanya gap antara *das sollen* (yang

seharusnya) dan *das sein* (yang terjadi) dalam fungsi partai politik.

Fenomena dominasi elektabilitas dan popularitas dalam rekrutmen politik dapat dilihat dari berbagai temuan empiris. Penelitian mengenai demokrasi internal partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai mengatur proses seleksi kandidat secara demokratis dan terbuka, dalam praktiknya faktor yang paling dominan dalam penetapan kandidat adalah keputusan elite partai, kemampuan finansial, elektabilitas, dan loyalitas politik, sementara proses kaderisasi belum menjadi pertimbangan utama (Prasojo et al., 2025). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kelembagaan partai yang menekankan kaderisasi dengan praktik rekrutmen yang lebih berorientasi pada peluang kemenangan elektoral.

Kecenderungan tersebut juga terlihat dari semakin kuatnya penggunaan survei elektabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan partai dalam menentukan calon yang akan diusung. Berbagai survei politik yang dilakukan menjelang Pemilu 2024 menunjukkan bahwa elektabilitas kandidat dan partai menjadi indikator utama dalam strategi pencalonan. Survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, menempatkan partai-partai berdasarkan tingkat elektabilitasnya dan menunjukkan bahwa pertimbangan keterpilihan menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam kompetisi politik kontemporer (Indikator Politik Indonesia, 2024).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa konteks politik elektoral di Indonesia, partai politik cenderung mengutamakan kandidat yang memiliki tingkat keterkenalan, popularitas, atau peluang menang yang tinggi dibandingkan kader yang telah melalui proses kaderisasi jangka panjang. Akibatnya, fungsi kaderisasi sebagai sarana regenerasi kepemimpinan

belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam proses rekrutmen politik. Dalam perspektif ilmu politik, rekrutmen politik merupakan bagian dari fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh partai politik. Namun dalam konteks Indonesia, fungsi ini mengalami pergeseran menjadi instrumen pragmatis untuk memenangkan kontestasi elektoral.

Firmanzah (2011) menjelaskan bahwa partai politik di Indonesia cenderung mengadopsi strategi *electoral pragmatism*, yaitu memilih kandidat yang memiliki peluang menang tinggi (*winnability*), bukan semata-mata berdasarkan kualitas atau rekam jejak kaderisasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa partai politik lebih berorientasi pada *vote-seeking behavior* dibandingkan *policy-seeking* atau *cadre-building function*. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Muhtadi (2019) yang menunjukkan bahwa dalam sistem pemilu proporsional terbuka, kandidat dengan tingkat popularitas tinggi memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Hal ini mendorong partai politik untuk menyesuaikan strategi rekrutmen dengan preferensi pemilih, yang cenderung memilih kandidat yang sudah dikenal dibandingkan yang memiliki kapasitas teknokratis. Dengan demikian, rekrutmen politik tidak lagi dipahami sebagai proses institusional untuk menghasilkan pemimpin berkualitas, melainkan sebagai strategi instrumental untuk memenangkan pemilu.

Selain pragmatis, rekrutmen politik di Indonesia juga menunjukkan karakter elitis dan terpusat. Proses pencalonan kandidat seringkali ditentukan oleh elite partai melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya transparan dan partisipatif. Menurut Budiardjo (2008), dalam sistem kepartaian yang belum terinstitusionalisasi dengan baik, keputusan strategis partai cenderung didominasi oleh elite. Hal ini juga terlihat dalam proses rekrutmen kandidat, di mana elite partai memiliki kewenangan besar dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan.

Studi oleh Romli (2016) menunjukkan bahwa lemahnya demokrasi internal partai menyebabkan proses kaderisasi tidak berjalan optimal. Kader yang telah lama berproses dalam partai tidak selalu mendapatkan prioritas dalam pencalonan, karena keputusan lebih ditentukan oleh pertimbangan elektoral dan kepentingan elite. Akibatnya, muncul fenomena *candidate-centered politics*, di mana individu kandidat menjadi lebih dominan dibandingkan institusi partai. Sebagian besar partai politik kehilangan fungsi sebagai organisasi kader dan berubah menjadi kendaraan politik yang fleksibel.

Salah satu manifestasi nyata dari pragmatisme dalam rekrutmen politik adalah munculnya fenomena *popularity based recruitment*, yaitu perekrutan kandidat berdasarkan tingkat popularitas dan daya tarik elektoral. Dalam beberapa tahun terakhir, partai politik di Indonesia активно merekrut artis, selebriti, dan figur publik untuk dijadikan calon legislatif maupun kandidat kepala daerah.

Pada Pemilu 2024, berbagai partai politik secara aktif merekrut figur publik, terutama artis, musisi, presenter, dan influencer sebagai calon anggota legislatif. Data menunjukkan bahwa puluhan figur publik didaftarkan oleh partai-partai politik sebagai bakal calon legislatif DPR RI, seperti PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, NasDem, dan partai lainnya. Beberapa nama yang direkrut antara lain Ahmad Dhani, Once Mekel, Denny Cagur, Krisdayanti, Verrell Bramasta, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Melly Goeslaw.

Lebih lanjut, hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa setidaknya 22 artis berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari total 580 anggota DPR yang ditetapkan KPU. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa figur publik memiliki daya tarik elektoral yang signifikan dan menjadi aset politik yang dipertimbangkan oleh partai dalam proses rekrutmen kandidat. Keberhasilan sejumlah artis memperoleh kursi

legislatif memperlihatkan bahwa tingkat popularitas dan pengenalan publik sering kali menjadi modal politik yang penting dalam kompetisi elektoral, di samping proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa popularitas telah menjadi salah satu indikator utama dalam proses seleksi kandidat. Fenomena ini menunjukkan bahwa popularitas telah menjadi salah satu indikator penting dalam proses seleksi kandidat oleh partai politik.

Menurut Haryanto (2014), dalam konteks demokrasi elektoral modern, media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk preferensi pemilih. Kandidat yang memiliki eksposur tinggi di media memiliki keuntungan elektoral yang signifikan. Oleh karena itu, partai politik cenderung memanfaatkan figur publik yang telah memiliki basis popularitas untuk meningkatkan elektabilitas.

Lebih lanjut, penelitian Syarif (2018) menunjukkan bahwa popularitas seringkali lebih berpengaruh dibandingkan kompetensi dalam menentukan pilihan pemilih, terutama di kalangan pemilih pemula dan pemilih dengan tingkat literasi politik yang rendah. Fenomena ini diperkuat oleh perkembangan media sosial yang memungkinkan kandidat membangun citra politik secara instan. Popularitas tidak lagi dibangun melalui proses panjang kaderisasi, tetapi dapat diperoleh melalui eksposur media dan strategi komunikasi politik yang efektif.

Dominasi *popularity based recruitment* berdampak langsung pada melemahnya sistem meritokrasi dalam partai politik. Kaderisasi yang seharusnya menjadi mekanisme utama dalam menyiapkan pemimpin masa depan menjadi terpinggirkan. Menurut Noor (2015), partai politik di Indonesia masih lemah dalam membangun sistem kaderisasi yang berkelanjutan. Banyak partai tidak memiliki sistem pembinaan kader yang jelas dan terstruktur. Akibatnya, ketika menghadapi pemilu, partai lebih memilih jalan pintas

dengan merekrut figur eksternal yang sudah populer.

Hal ini juga berdampak pada menurunnya insentif bagi kader internal untuk berproses dalam partai. Ketika peluang untuk maju sebagai kandidat tidak ditentukan oleh prestasi dan loyalitas, maka motivasi kader untuk mengikuti proses kaderisasi menjadi menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Partai politik tidak mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman organisasi yang memadai.

Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, perlu dilihat interaksi antara tiga faktor utama, yaitu sistem pemilu, perilaku pemilih, dan strategi partai politik. Pertama, sistem pemilu proporsional terbuka mendorong kompetisi antar kandidat dalam satu partai, sehingga popularitas menjadi faktor penting. Kedua, perilaku pemilih yang cenderung memilih berdasarkan pengenalan (*name recognition*) memperkuat posisi kandidat populer. Ketiga, partai politik sebagai aktor rasional akan menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi tersebut.

Menurut Mujani, Liddle, dan Ambardi (2012), perilaku pemilih di Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan psikologis, termasuk kedekatan emosional dengan figur tertentu. Hal ini menjelaskan mengapa figur publik memiliki daya tarik elektoral yang tinggi. Dengan demikian, *popularity based recruitment* bukan hanya disebabkan oleh kelemahan internal partai, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi struktural dalam sistem politik Indonesia.

2. Fenomena Popularity Based Recruitment dalam Praktik Politik

Fenomena *popularity based recruitment* dalam praktik politik Indonesia menunjukkan adanya pergeseran pola rekrutmen kandidat oleh partai politik dari orientasi kaderisasi menuju pertimbangan elektabilitas dan popularitas. Keterlibatan figur publik dan

selebriti dalam pemilihan umum bukanlah fenomena baru. Penelitian Firmansyah dan Kamarudin (2014) menunjukkan bahwa pada Pemilu 2014 partai politik telah menjadikan selebriti sebagai modal politik karena memiliki tingkat keterkenalan yang tinggi di masyarakat sehingga dianggap mampu meningkatkan perolehan suara partai. Kecenderungan tersebut berlanjut pada Pemilu 2019. Penelitian Prayitno dan Putra (2024) menemukan bahwa Partai NasDem menjadi partai yang paling banyak merekrut selebriti sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rekrutmen selebriti dilakukan karena popularitas yang dimiliki dianggap dapat meningkatkan daya saing elektoral partai.

Pada Pemilu 2024, tren tersebut semakin terlihat dengan banyaknya figur publik yang direkrut oleh berbagai partai politik. Data menunjukkan bahwa puluhan artis, penyanyi, presenter, dan influencer didaftarkan sebagai calon anggota legislatif oleh berbagai partai politik. Bahkan, setelah pemilu berlangsung, sebanyak 22 figur publik dari kalangan artis berhasil memperoleh kursi di DPR RI periode 2024–2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa partai politik semakin terbuka merekrut kandidat yang memiliki tingkat popularitas tinggi sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas dan daya tarik pemilih.

Rangkaian temuan tersebut mengindikasikan bahwa sejak Pemilu 2014 hingga Pemilu 2024 terdapat kecenderungan berkelanjutan dalam pemanfaatan figur publik sebagai instrumen rekrutmen politik. Meskipun tidak menggantikan sepenuhnya mekanisme kaderisasi, meningkatnya keterlibatan selebriti dan tokoh populer dalam pencalonan menunjukkan bahwa popularitas telah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses seleksi kandidat oleh partai politik Indonesia. Dalam perspektif teori politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *political capital* (modal politik), di mana popularitas menjadi salah satu bentuk modal simbolik yang sangat

berharga. Dalam konteks Indonesia, popularitas yang diperoleh melalui media massa dan industri hiburan bertransformasi menjadi modal elektoral yang dapat dikonversi menjadi suara dalam pemilu.

Penelitian oleh Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa dalam demokrasi elektoral Indonesia, keberhasilan kandidat tidak hanya ditentukan oleh kapasitas atau ideologi, tetapi juga oleh kombinasi antara popularitas, jaringan patronase, dan sumber daya ekonomi. Hal ini diperkuat oleh temuan Mietzner (2013) yang menyatakan bahwa sistem kepartaian di Indonesia cenderung pragmatis dan berorientasi pada kemenangan, sehingga partai lebih memilih kandidat yang memiliki peluang elektoral tinggi. Dalam studi literatur Indonesia, Firmanzah (2011) menegaskan bahwa partai politik semakin mengadopsi pendekatan pemasaran politik (*political marketing*), di mana kandidat diposisikan sebagai “produk” yang harus memiliki daya tarik bagi pemilih. Dalam konteks ini, popularitas menjadi indikator utama daya jual kandidat di pasar politik.

Lebih lanjut, Haryanto (2014) menjelaskan bahwa dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih cenderung menggunakan *heuristic voting behavior*, yaitu memilih kandidat berdasarkan informasi sederhana seperti popularitas atau tingkat pengenalan, dibandingkan dengan evaluasi mendalam terhadap program atau kapasitas kandidat. Hal ini semakin memperkuat posisi figur publik dalam kontestasi politik.

Perkembangan media massa dan media sosial turut mempercepat maraknya *popularity based recruitment*. Dalam era digital, popularitas tidak lagi hanya dibangun melalui televisi atau film, tetapi juga melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Kandidat dengan jumlah pengikut besar memiliki keunggulan dalam menjangkau pemilih secara langsung tanpa melalui struktur partai. Menurut Lim (2017), media sosial telah mengubah lanskap

komunikasi politik di Indonesia dengan menciptakan ruang bagi personalisasi politik (*personalized politics*). Dalam konteks ini, figur individu menjadi lebih penting dibandingkan institusi partai. Hal ini mendorong partai politik untuk merekrut figur yang telah memiliki personal branding kuat di ruang digital. Studi oleh Tapsell (2015) juga menunjukkan bahwa oligarki media di Indonesia berperan dalam membentuk popularitas kandidat. Figur yang memiliki akses ke media atau sering tampil di media cenderung memiliki peluang lebih besar untuk dikenal publik, sehingga meningkatkan elektabilitasnya. Secara empiris, fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah artis yang terjun ke dunia politik dan menduduki jabatan publik sebagai anggota DPR RI, DPRD, maupun kepala daerah. Dalam satu dekade terakhir, partai politik semakin banyak merekrut figur publik untuk meningkatkan elektabilitas dan perolehan suara, bahkan menempatkan mereka pada posisi strategis dalam kontestasi politik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan elektabilitas sering kali lebih dominan dibandingkan proses kaderisasi yang sistematis dalam mekanisme rekrutmen politik partai.

Tabel 1. Jumlah Artis yang Terpilih Menjadi Anggota DPR RI (2009–2024)

Periode DPR RI	Jumlah Artis Terpilih
2009–2014	18
2014–2019	18
2019–2024	13
2024–2029	24
Total	73

Sumber: Diolah dari berbagai publikasi KPU dan media nasional. Data 2009, 2014, 2019, dan 2024.

Fenomena ini menunjukkan bahwa popularitas telah menjadi salah satu indikator penting dalam proses seleksi kandidat oleh

partai politik. Pada Pemilu 2024, sedikitnya 23 figur publik dari kalangan artis berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dan tersebar di tujuh partai politik. Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai dengan jumlah artis terpilih terbanyak, yaitu enam orang, disusul Partai Gerindra sebanyak lima orang dan PDI Perjuangan sebanyak empat orang. Kehadiran figur publik dalam jumlah yang cukup besar di parlemen menunjukkan bahwa tingkat popularitas dan pengenalan publik menjadi modal politik yang bernilai dalam proses rekrutmen dan pencalonan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa konteks elektoral, partai politik cenderung mempertimbangkan daya tarik elektoral kandidat yang telah memiliki basis pengenalan publik dibandingkan hanya mengandalkan proses kaderisasi internal yang berlangsung secara jangka panjang.

Hidayat (2009) dalam kajiannya tentang rekrutmen politik di Indonesia menyatakan bahwa partai politik cenderung mengutamakan kandidat dengan *vote-getting capacity* dibandingkan dengan kualitas kaderisasi. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi elektoral menjadi faktor dominan dalam proses seleksi kandidat.

Salah satu dampak utama dari *popularity based recruitment* adalah melemahnya sistem kaderisasi dalam partai politik. Kaderisasi yang seharusnya menjadi proses utama dalam menyiapkan pemimpin masa depan menjadi terpinggirkan oleh kepentingan elektoral jangka pendek. Menurut Rahman (2018), lemahnya kaderisasi partai di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya sistem pembinaan yang berkelanjutan serta dominasi elite dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini, kader internal seringkali kalah bersaing dengan figur eksternal yang memiliki popularitas lebih tinggi.

Selain itu, Budiardjo (2008) menekankan bahwa partai politik yang tidak mampu menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik

akan mengalami krisis kepemimpinan dalam jangka panjang. Hal ini karena tidak adanya regenerasi yang sistematis dan berbasis kompetensi. Selain berdampak pada kaderisasi, *popularity based recruitment* juga berimplikasi terhadap kualitas kepemimpinan dan demokrasi. Kandidat yang direkrut berdasarkan popularitas belum tentu memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun perumusan kebijakan publik.

Menurut Piliang (2015), fenomena ini merupakan bagian dari “demokrasi citra” (*image democracy*), di mana citra dan popularitas lebih dominan dibandingkan substansi politik. Dalam kondisi ini, politik menjadi lebih bersifat performatif daripada substantif. Lebih lanjut, studi oleh Hadiz (2010) menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dipengaruhi oleh kekuatan oligarki, di mana akses terhadap sumber daya dan popularitas menjadi faktor utama dalam menentukan kekuasaan. Hal ini menyebabkan proses demokrasi tidak sepenuhnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa *popularity based recruitment* juga memiliki sisi positif, yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Figur publik yang dikenal luas dapat menarik perhatian pemilih yang sebelumnya apatis terhadap politik. Akan tetapi, tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas kandidat, partisipasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *popularity based recruitment* merupakan konsekuensi dari interaksi antara sistem pemilu, perilaku pemilih, perkembangan media, dan strategi partai politik. Popularitas menjadi salah satu variabel kunci dalam menentukan keberhasilan kandidat dalam pemilu, sehingga partai politik menyesuaikan strategi rekrutmen mereka untuk memanfaatkan peluang kemenangan. Namun, dominasi pendekatan ini berpotensi menciptakan

dilema antara elektabilitas dan kualitas kepemimpinan. Tanpa adanya reformasi dalam sistem rekrutmen politik, partai politik akan terus terjebak dalam logika pragmatis yang mengutamakan kemenangan jangka pendek dibandingkan pembangunan kepemimpinan jangka panjang.

3. Tantangan *Merit Based Recruitment* dalam Sistem Kepartaian

Secara normatif, *merit based recruitment* merupakan prinsip ideal dalam sistem kepartaian modern, di mana proses seleksi kandidat dilakukan berdasarkan kompetensi, kapasitas kepemimpinan, pengalaman organisasi, serta integritas personal. Dalam kerangka demokrasi substantif, mekanisme ini menjadi kunci untuk menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki legitimasi elektoral, tetapi juga kapabilitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan representasi politik.

Namun dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen politik masih menghadapi berbagai tantangan struktural, institusional, dan kultural. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari internal partai politik, tetapi juga dari desain sistem pemilu, perilaku pemilih, serta dinamika ekonomi-politik yang melingkupi proses demokrasi.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan *merit-based recruitment* adalah tingginya biaya politik (*high-cost politics*) dalam proses pemilu di Indonesia. Biaya kampanye yang besar, kebutuhan logistik politik, serta praktik politik uang (*money politics*) mendorong partai politik untuk lebih mengutamakan kandidat yang memiliki sumber daya finansial kuat dibandingkan kandidat yang memiliki kapasitas tetapi terbatas secara ekonomi. Temuan KPK menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan bupati/wali kota berkisar antara Rp20–30 miliar, sedangkan untuk pemilihan gubernur dapat mencapai Rp100 miliar. Bahkan, survei KPK pada Pilkada 2017 menemukan bahwa rata-rata biaya politik kandidat yang berhasil memenangkan pilkada mencapai sekitar Rp65

miliar. Selain itu, sebanyak 95,5% responden dalam survei tersebut menilai bahwa faktor finansial merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemenangan kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

Tabel 2 Indikator Biaya Politik

Indikator Biaya Politik	Nilai
Biaya pencalonan Bupati/Wali Kota	Rp20–30 miliar
Biaya pencalonan Gubernur	± Rp100 miliar
Rata-rata biaya pemenang Pilkada (Survei KPK)	Rp65 miliar

Sumber: www.idntimes.com

Tingginya biaya politik tersebut menciptakan insentif bagi partai politik untuk mempertimbangkan kemampuan finansial kandidat sebagai salah satu faktor utama dalam proses pencalonan. Akibatnya, kader yang memiliki kompetensi, pengalaman organisasi, dan rekam jejak yang baik tidak selalu memperoleh kesempatan yang sama apabila tidak didukung oleh modal ekonomi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya biaya politik berpotensi melemahkan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen politik karena proses seleksi tidak sepenuhnya didasarkan pada kapasitas dan kualitas kandidat, melainkan juga pada kemampuan mereka menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam kompetisi elektoral. Aspinall dan Sukmajati (2016) dalam studi tentang politik uang di Indonesia menunjukkan bahwa praktik *vote buying* dan *patronage* masih menjadi bagian integral dari proses pemilu. Kandidat yang mampu menyediakan sumber daya finansial memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi, sehingga partai politik cenderung memprioritaskan kandidat dengan kemampuan finansial tinggi.

Dalam konteks ini, meritokrasi menjadi tereduksi oleh logika pasar politik, yaitu

kondisi ketika proses rekrutmen dan pencalonan politik lebih dipengaruhi oleh mekanisme pertukaran sumber daya dibandingkan penilaian atas kualitas individu. Tingginya biaya politik dalam sistem elektoral mendorong partai politik untuk mempertimbangkan kemampuan finansial kandidat sebagai salah satu faktor penting dalam proses seleksi. Akibatnya, kandidat yang memiliki modal ekonomi kuat sering kali memperoleh peluang yang lebih besar untuk dicalonkan dibandingkan kader yang memiliki kompetensi, pengalaman organisasi, dan kapasitas kepemimpinan yang baik tetapi terbatas secara finansial. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya biaya politik dapat melemahkan prinsip meritokrasi karena proses seleksi tidak sepenuhnya didasarkan pada kemampuan dan prestasi kandidat, melainkan juga pada kemampuan mereka menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam kompetisi elektoral.

Firmanzah (2011) menyebut fenomena ini sebagai komersialisasi politik, di mana pencalonan kandidat menjadi semacam investasi politik yang membutuhkan modal besar. Lebih lanjut, Muhtadi (2019) menegaskan bahwa tingginya biaya politik juga berkaitan erat dengan perilaku pemilih yang masih toleran terhadap praktik politik uang. Hal ini menciptakan lingkaran setan (*vicious cycle*) yang menghambat penerapan sistem rekrutmen berbasis merit.

Tantangan berikutnya adalah lemahnya institusionalisasi partai politik dalam beberapa kasus di Indonesia. Penelitian Mietzner (2013) menunjukkan bahwa sejumlah partai politik pasca-Reformasi masih memperlihatkan kecenderungan personalisasi kepemimpinan, yaitu ketika pengambilan keputusan strategis sangat dipengaruhi oleh tokoh sentral atau kelompok elite tertentu. Fenomena ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dinamika internal beberapa partai yang memiliki figur dominan sebagai pendiri, ketua umum, atau pemegang pengaruh utama dalam organisasi. Dalam

kondisi tersebut, proses penentuan kandidat sering kali lebih bergantung pada keputusan elite dibandingkan mekanisme kaderisasi dan seleksi yang terbuka. Akibatnya, rekrutmen politik berpotensi tidak sepenuhnya didasarkan pada kapasitas, kompetensi, dan prestasi kader, sehingga prinsip meritokrasi sulit diterapkan secara optimal.

Dalam literatur Indonesia, Noor (2012) juga mengemukakan bahwa kelembagaan partai politik di Indonesia masih belum matang, terutama dalam hal kaderisasi dan rekrutmen politik. Partai cenderung mengabaikan sistem pembinaan kader dan lebih fokus pada strategi elektoral jangka pendek. Keterkaitan antara lemahnya institusionalisasi partai dan dominasi elite melahirkan persoalan lain, yaitu minimnya demokrasi internal dalam partai politik. Dalam sistem yang ideal, proses seleksi kandidat seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang kompetitif, transparan, dan partisipatif, misalnya melalui konvensi atau pemilihan internal. Namun dalam kenyataannya, proses tersebut seringkali bersifat tertutup dan elitis. Elite partai memiliki kewenangan besar dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan, sehingga membuka ruang bagi praktik patronase dan nepotisme.

Menurut Budiardjo (2008), partai politik yang tidak demokratis secara internal akan sulit menjalankan fungsi demokrasi secara eksternal. Hal ini karena nilai-nilai demokrasi tidak diinternalisasi dalam struktur organisasi partai itu sendiri. Studi oleh Hidayat (2009) juga menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik di Indonesia masih didominasi oleh pertimbangan subjektif elite, bukan berdasarkan sistem penilaian yang objektif dan berbasis merit. Akibatnya, kader yang memiliki kompetensi seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kandidat yang memiliki kedekatan dengan elite.

Sistem kaderisasi merupakan fondasi utama dalam penerapan merit based

recruitment. Melalui kaderisasi, partai politik dapat menyiapkan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, loyalitas, dan pemahaman ideologis yang kuat. Namun dalam konteks Indonesia, sistem kaderisasi masih menjadi titik lemah dalam banyak partai politik. Rahman (2018) menyatakan bahwa banyak partai tidak memiliki program kaderisasi yang berkelanjutan dan terstruktur. Kaderisasi seringkali hanya bersifat formalitas tanpa adanya pembinaan yang serius.

Kaderisasi dalam sejumlah partai politik masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian Nurdiaman dkk. (2019) mengenai proses kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kabupaten Garut menemukan bahwa pelaksanaan kaderisasi lapangan belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya organisasi, tidak adanya mekanisme tindak lanjut pasca-pelatihan, serta lemahnya monitoring terhadap kader yang telah mengikuti proses kaderisasi. Akibatnya, sebagian peserta kaderisasi tidak melaksanakan tugas kaderisasi lapangan secara maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa proses kaderisasi tidak hanya menghadapi persoalan pada tahap pelatihan, tetapi juga pada aspek pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Selain itu, Wijayanti dan Iswandi (2021) menjelaskan bahwa proses kaderisasi masih menjadi tantangan bagi sejumlah partai politik di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian partai belum memiliki sistem kaderisasi yang jelas dan berkelanjutan sehingga proses rekrutmen politik sering kali lebih dipengaruhi oleh kedekatan dengan elite partai, hubungan personal, atau faktor primordial dibandingkan hasil kaderisasi yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaderisasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menyiapkan calon pemimpin dan kader partai secara meritokratis.

Selain itu, adanya praktik rekrutmen instan (*instant recruitment*) terhadap figur eksternal juga menghambat perkembangan kader internal. Kader yang telah lama berproses dalam partai menjadi kurang termotivasi karena peluang mereka untuk maju dalam kontestasi politik relatif kecil. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan krisis kepemimpinan dalam partai politik, karena tidak adanya regenerasi yang berbasis kompetensi dan pengalaman organisasi.

Tantangan lain dalam penerapan merit based recruitment adalah desain sistem pemilu dan perilaku pemilih. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia mendorong kompetisi antar kandidat dalam satu partai, sehingga kandidat harus membangun basis dukungan sendiri. Dalam sistem ini, faktor popularitas, jaringan sosial, dan sumber daya ekonomi menjadi sangat penting. Kandidat yang memiliki kapasitas tetapi tidak memiliki popularitas atau sumber daya akan kesulitan bersaing. Haryanto (2014) menjelaskan bahwa perilaku pemilih di Indonesia masih cenderung pragmatis dan personalistik. Pemilih lebih mempertimbangkan faktor kedekatan emosional, popularitas, atau insentif material dibandingkan dengan kapasitas dan program kandidat.

Pemilih tidak selalu menjadikan kapasitas kandidat dan program kebijakan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan pilihan politik. Survei Populix menjelang Pilkada 2024 terhadap 962 responden menunjukkan bahwa 46% responden menyatakan pilihan mereka tidak dipengaruhi oleh partai penguasa, sementara 33% responden mengaku bahwa pilihan terhadap calon kepala daerah justru akan memengaruhi pilihan partai mereka di masa mendatang. Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik personal kandidat memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan identitas partai politik dalam membentuk preferensi pemilih. Selain itu, responden juga menempatkan rekam jejak, profil pribadi, dan

citra kandidat sebagai pertimbangan penting dalam menentukan pilihan politik. Hal ini menunjukkan bahwa karakter dan kredibilitas calon tetap menjadi faktor yang memengaruhi preferensi pemilih dalam proses pengambilan keputusan politik.

Tabel 3 Preferensi Pemilih Pada Pemilu 2024

Preferensi Pemilih	Persentase
Memilih berdasarkan figur/kandidat	63%
Memilih berdasarkan kandidat dan partai	32%
Memilih berdasarkan partai	5%

Sumber: Survei Crown Indonesia (2024)

Temuan serupa juga terlihat dalam survei Crown Indonesia pada Pemilu 2024 yang menunjukkan bahwa 63% responden lebih memilih calon legislatif berdasarkan figur atau tokoh kandidat, sedangkan hanya 5% yang menyatakan memilih berdasarkan partai politik dan 32% memilih berdasarkan kombinasi kandidat dan partai. Data tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemilih terhadap figur kandidat masih sangat kuat dalam politik elektoral Indonesia. Kondisi ini menjelaskan mengapa popularitas, kedekatan emosional, dan daya tarik personal kandidat sering menjadi pertimbangan penting dalam perilaku memilih, di samping faktor kapasitas dan program yang ditawarkan kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan meritokrasi tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga dari preferensi pemilih yang belum sepenuhnya rasional dalam memilih kandidat.

4. Dampak terhadap Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Dominasi praktik *popularity based recruitment* memiliki implikasi signifikan terhadap proses regenerasi kepemimpinan nasional. Implikasi tersebut terlihat dari berkurangnya peluang kader internal untuk memperoleh pencalonan, meningkatnya ketergantungan

partai pada figur publik atau tokoh yang telah memiliki basis popularitas, serta melemahnya fungsi kaderisasi sebagai mekanisme utama penyiapan pemimpin politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terbentuknya jalur karier politik yang berbasis kompetensi dan pengalaman organisasi, sehingga proses regenerasi kepemimpinan lebih banyak ditentukan oleh tingkat keterkenalan kandidat dibandingkan kualitas kepemimpinan yang dibangun melalui kaderisasi. Akibatnya, partai politik berpotensi mengalami kesulitan dalam menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, loyalitas organisasi, dan pemahaman yang kuat terhadap ideologi serta program partai.

Namun ketika partai lebih mengutamakan popularitas dibandingkan kapasitas, proses regenerasi kepemimpinan menjadi tidak berjalan secara optimal. Tomsa (2010) menunjukkan bahwa personalisasi politik dan lemahnya institusionalisasi partai di Indonesia telah mendorong partai politik untuk lebih berorientasi pada figur yang memiliki daya tarik elektoral dibandingkan penguatan kaderisasi internal. Akibatnya, proses regenerasi kepemimpinan tidak selalu berjalan melalui jenjang pembinaan yang sistematis. Temuan serupa disampaikan oleh Mietzner (2013) yang menjelaskan bahwa meningkatnya pragmatisme elektoral dalam partai politik Indonesia mendorong partai untuk memprioritaskan kandidat yang dianggap memiliki peluang menang tinggi, meskipun tidak selalu memiliki pengalaman panjang dalam organisasi partai.

Dalam beberapa kasus, fenomena rekrutmen figur publik seperti artis, selebritas, atau tokoh populer yang langsung memperoleh pencalonan pada pemilihan legislatif menunjukkan bahwa popularitas sering menjadi pertimbangan penting dalam proses seleksi kandidat. Meskipun tidak seluruh figur publik memiliki kapasitas yang rendah, penelitian mengenai rekrutmen politik menunjukkan bahwa dominasi pertimbangan elektoral dapat

mengurangi peran kaderisasi sebagai mekanisme penyiapan pemimpin politik. Kondisi tersebut berpotensi membatasi kesempatan kader yang telah menjalani proses pembinaan politik secara berjenjang dan dapat menghambat kualitas regenerasi kepemimpinan dalam jangka panjang karena pengalaman organisasi dan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan tidak selalu menjadi faktor utama dalam proses pencalonan.

Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan dinamika politik dalam era demokrasi modern yang dipengaruhi oleh perkembangan media dan teknologi informasi. Popularitas yang dibangun melalui media massa dan media sosial menjadi modal politik yang sangat penting dalam memenangkan pemilu. Oleh karena itu, partai politik cenderung memanfaatkan figur yang telah memiliki basis popularitas kuat untuk meningkatkan daya saing elektoral mereka. Dengan demikian, tantangan utama bagi partai politik di Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan elektoral jangka pendek dengan upaya membangun sistem kaderisasi dan rekrutmen politik yang berbasis meritokrasi. Tanpa adanya reformasi dalam sistem rekrutmen politik, regenerasi kepemimpinan nasional yang berkualitas akan sulit terwujud.

5. Conclusions

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai institusi utama dalam mewujudkan regenerasi kepemimpinan nasional melalui pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dan kaderisasi. Dalam sistem demokrasi, kedua fungsi tersebut merupakan instrumen fundamental yang menentukan kualitas pemimpin yang akan menduduki jabatan publik, baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif. Secara normatif, rekrutmen politik dan kaderisasi seharusnya dilaksanakan secara sistematis, transparan, demokratis, akuntabel,

serta berlandaskan prinsip meritokrasi, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan, dan komitmen yang kuat terhadap kepentingan publik serta nilai-nilai demokrasi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara fungsi ideal partai politik dengan implementasinya dalam praktik politik di Indonesia. Mekanisme rekrutmen politik masih didominasi oleh pendekatan pragmatis yang lebih mengutamakan pertimbangan elektabilitas, popularitas, kekuatan finansial, dan kedekatan dengan elite partai dibandingkan kompetensi, pengalaman organisasi, serta proses kaderisasi yang berkelanjutan. Fenomena popularity-based recruitment menjadi indikasi bahwa orientasi kemenangan elektoral jangka pendek masih lebih dominan dibandingkan upaya membangun sistem regenerasi kepemimpinan yang berkualitas dan berkesinambungan. Akibatnya, proses seleksi calon pemimpin belum sepenuhnya mencerminkan prinsip meritokrasi yang menjadi fondasi utama dalam pelembagaan partai politik yang demokratis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lemahnya kualitas regenerasi kepemimpinan nasional tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem rekrutmen politik, tetapi merupakan konsekuensi dari interaksi berbagai faktor struktural yang saling berkaitan. Dominasi oligarki dalam tubuh partai politik, tingginya biaya politik, belum optimalnya sistem kaderisasi, lemahnya demokrasi internal partai, serta masih maraknya praktik politik uang menjadi faktor-faktor yang secara simultan menghambat terbentuknya mekanisme seleksi kepemimpinan yang objektif, terbuka, dan berbasis kompetensi. Kondisi tersebut menyebabkan kesempatan politik lebih banyak dinikmati oleh individu yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi maupun jaringan elite politik dibandingkan kader yang telah melalui proses pembinaan organisasi secara sistematis.

Akibatnya, sirkulasi elite politik cenderung bersifat tertutup dan lebih mengarah pada reproduksi elite daripada pembaruan kepemimpinan yang berbasis kapasitas dan prestasi.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kualitas regenerasi kepemimpinan nasional sangat ditentukan oleh keterpaduan antara sistem rekrutmen politik dan kaderisasi yang dijalankan secara konsisten. Rekrutmen politik yang tidak didukung oleh kaderisasi yang kuat berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang bersifat instan, pragmatis, dan minim pengalaman organisasi. Sebaliknya, kaderisasi yang telah berjalan dengan baik tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila mekanisme rekrutmen masih dikendalikan oleh kepentingan elite dan pertimbangan elektoral semata. Dengan demikian, efektivitas regenerasi kepemimpinan nasional hanya dapat diwujudkan apabila kedua fungsi tersebut berjalan secara sinergis dalam kerangka kelembagaan partai politik yang demokratis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan partai politik menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Reformasi tersebut perlu diarahkan pada penguatan sistem rekrutmen politik yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berbasis merit, disertai dengan sistem kaderisasi yang terstruktur, berjenjang, berkelanjutan, serta mampu mengembangkan kapasitas kepemimpinan kader secara komprehensif. Selain itu, penguatan demokrasi internal partai, pembatasan dominasi oligarki, peningkatan akuntabilitas organisasi, serta penciptaan kompetisi politik yang lebih adil merupakan prasyarat penting untuk memperluas kesempatan politik bagi kader-kader yang memiliki kompetensi dan integritas.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan rekrutmen politik dan kaderisasi sebagai dua pilar utama regenerasi kepemimpinan nasional.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi partai politik dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem rekrutmen dan kaderisasi yang lebih demokratis, transparan, dan berbasis merit. Dengan demikian, partai politik diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi demokrasi yang menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

6. Acknowledgement

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Riau, yang telah memberikan lingkungan akademik yang kondusif sehingga proses penelitian dan penulisan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan juga diberikan kepada para peneliti dan akademisi yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam memperkaya landasan teoritis serta analisis yang disajikan dalam penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada editor dan mitra bestari (*reviewers*) atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan naskah ini. Seluruh masukan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas substansi dan penyajian artikel. Akhirnya, penulis menyatakan bahwa penelitian ini disusun secara independen dengan menjunjung tinggi prinsip integritas akademik. Segala isi, analisis, dan kesimpulan yang disampaikan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

7. References

- Ambardi, K. (2009). Mengungkap politik kartel: Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi. Jakarta: KPG.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Elector al dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism*. Singapore: NUS Press.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2026). *Temuan dan Laporan Politik Uang pada Pemilu 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erlina, F. (2023). Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi. *Kosmik Hukum*, 23(2), 200–214.
- Firmansyah, J., & Kamarudin. (2014). *Electability of Indonesian Celebrities Candidates on National Legislative Election in 2014*
- Firmanzah. (2011). *Mengelola partai politik: Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Jakarta: Yayasan n Obor Indonesia.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia*. Stanford University Press.
- Harahap, I. H. (2017). *Kaderisasi partai politik dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan nasional*. Universitas Bakrie.
- Haris, S. (2014). *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka n Obor Indonesia.
- Haris, S., et al. (2016). *Panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Haryanto. (2014). *Sistem politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat, S. (2009). Rekrutmen politik dan kaderisasi partai politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Koho, I. R. (2021). Oligarki dalam demokrasi Indonesia. *Lensa*, 4(50), 60–69.
- Lim, M. (2017). *Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia*. Critical Asian Studies.
- Michels, R. (1911/1962). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. New York: Free Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdak arya.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Muhtadi, B. (2019). *Kuasa uang: Politik uang dalam pemilu pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Muhtadi, B. (2024). *Survei Nasional Evaluasi Pemilu 2024*. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa rakyat: Analisis tentang perilaku memilih dalam pemilu legislatif Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Noor, F. (2012). *Partai politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Noor, F. (2015). *Kaderisasi partai politik di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2).
- Nugroho, M. B. A., & Hosnah, A. (2024). Problematika oligarki dalam partai politik yang memicu lahirnya tindak pidana korupsi. *Palar (Pakuan Law Review)*, 10(2), 31–42.
- Nurdiaman, M., Hasyim, S. B., Purnawan, R. A., & Kalamullah. (2019). *Analisis Proses Kaderisasi Pada Partai Demokrasi*

- Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 2(2).
- Pareto, V. (1935). *The mind and society*. New York: Harcourt Brace.
- Piliang, Y. A. (2015). *Dunia yang dilipat: Tamasya melampaui batas batas kebudayaan*. Bandung: Matahari.
- Prayitno, A., & Putra, A. T. (2024). Daya Tarik Selebriti Dalam Politik: Studi Kasus Rekrutmen Caleg Artis Oleh Partai NasDem Pada Pemilu 2019. *JISIP*, 13(3), 476–489
- Rahman, A. (2018). Krisis kaderisasi partai politik di Indonesia. *Jurnal Politik*.
- Romli, L. (2016). *Problematika institusionalisasi partai politik di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Suhaimi, E. (2019). Prinsip-prinsip umum rekrutmen politik sebagai landasan ideal penyusunan pola rekrutmen dalam AD/ART partai politik di Indonesia. *Jurnal Tripantang*, 27–29.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syarif, H. (2018). Perilaku pemilih dan pengaruh popularitas kandidat dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 3(1).
- Tapsell, R. (2015). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. Rowman & Littlefield.
- Tomsa, D. (2010). The Indonesian Party System after the 2009 Elections: Towards Stability? dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia. *SASI*, 27(4), 475–491
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yandra, A., Irawati, I., Utami, B. C., & Nursafira, M. S. (2020). The Consistency of Political Party in Legislative Recruitment Candidates on Election 2019. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 1(1), 44-56.
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). Politik uang dalam pemilu dan pemilihan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.